

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGAJIAN PNS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA

Chavellino Karundeng, Frida M. Sumual, Aprili Bacilius

Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano
e-mail: chavellinok@gmail.com, 2Nci frida, 3aprilibacilius@unima.ac.id

Abstrak: Masalah umum dalam sistem penggajian adalah keterlambatan pembayaran gaji pegawai akibat terlambatnya pemasukan dokumen, seperti daftar gaji dan daftar hadir. Untuk mengetahui sistem penggajian PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan sistem akuntansi penggajian PNS, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan berfungsi sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Universitas Negeri Manado. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama, seperti kepegawaian, pencatatan waktu, pembuatan daftar gaji, akuntansi, dan keuangan, beroperasi dengan baik dan terintegrasi menggunakan teknologi informasi. Dokumen-dokumen yang digunakan, termasuk Daftar Hadir Pegawai (DHP) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan surat-surat yang lain telah teratur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggajian. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan penerapan teknologi digital yang lebih canggih, pelatihan rutin bagi staf, serta sistem verifikasi yang lebih ketat untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem akuntansi penggajian dapat lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan dan teknologi di masa depan.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Penggajian PNS

Astract: A common problem in the payroll system is the delay in payment of employee salaries due to late entry of documents, such as payroll and attendance list. To find out the payroll system for civil servants at the Population and Civil Registration Office of Minahasa Regency. This research is useful to broaden the insight of the accounting system for civil servant payroll, become a reference for further researchers, and serve as a reference for the Population and Civil Registration Office and Manado State University. The method used in this research, using a qualitative descriptive method that describes the data in the form of words. The results show that key functions, such as staffing, timekeeping, payroll generation, accounting, and finance, operate well and are integrated using information technology. The documents used, including the Employee Attendance List (DHP) and Payment Order Letter (SPP), and other letters are in order to ensure transparency and accountability in the payroll process. However, this study recommends the implementation of more advanced digital technology, regular training for staff, and a stricter verification system to improve the efficiency and security of the system. With these measures, it is expected that the payroll accounting system can be more adaptive to the development of needs and technology in the future.

Keywords : Civil Servant Payroll Accounting System

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat tentang latar belakang, landasan teori, masalah, rencana pemecahan masalah dan tujuan penelitian. Pendahuluan ditulis menggunakan huruf Arial, ukuran 11 dan spasi 1.15.

Teks diketik di dalam sebuah luasan print dengan margin dari atas, bawah, kiri, kanan dibuat 1 inch. Ukuran paper A4, lebar 8,27 inch, tinggi 11,69 inch. Layout: header 0,5 inch, footer 0,5 inch. Teks diberi nomor halaman.

Pada era kemajuan saat ini, setiap perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, harus memiliki sistem akuntansi penggajian yang baik. Dalam hal ini, sistem akuntansi yang baik berarti sistem akuntansi yang sudah berjalan dan efisien. Jika sesuatu dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya, itu dikatakan efektif, sedangkan jika sesuatu dapat meminimalkan atau mengurangi biaya yang telah digunakan

sebelumnya. Menurut Kurniawan (2020), sistem akuntansi terdiri dari serangkaian sistem yang melakukan proses untuk pengguna akhir dan mengumpulkan dan menyimpan data akuntansi untuk digunakan di masa depan.

Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja, baik karyawan maupun pegawai, sebagai imbalan atas pekerjaan atau layanan yang mereka berikan kepada organisasi atau instansi. Ada sistem yang berbeda saat membayar yaitu golongan sosial dan posisi pekerjaan yang mempengaruhi gaji yang diterima pekerja (Suripatty & J, 2020). Memberikan informasi keuangan untuk memantau kinerja kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, kontrak yang disepakati dan kondisi yang dipersyaratkan Freddy S. Kawatu (2019).

Semua dokumen dan pencatatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku harus digunakan untuk membuktikan pembayaran gaji. Untuk menentukan gaji, hal-hal seperti daftar hadir dan jam kerja harus diperhatikan agar gaji sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan karyawan. Dalam sebuah organisasi, hukuman juga sangat penting (Rumiris, 2013) agar karyawan lebih termotivasi untuk tetap hadir dan tidak terlambat.

Hal-hal yang mencakup sistem akuntansi penggajian berkaitan dengan masalah penggajian pegawai; penggolongan sistem akuntansi penggajian adalah salah satunya. Adanya sistem akuntansi penggajian akan mengurangi kesalahan atau masalah yang dapat menyebabkan instansi pemerintah dan perusahaan swasta mengalami kerugian, baik secara tidak disengaja. Salah satu manfaat lain dari adanya sistem akuntansi penggajian adalah dapat mengatur operasi bisnis sehingga bisnis dapat berjalan lancar tanpa kecurangan keuangan.

Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Minahasa, mengikuti regulasi umum dengan beberapa penyesuaian untuk kebutuhan dan spesifikasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Minahasa. Sistem ini terintegrasi dengan SIPD yang menghasilkan laporan yang detail dan akurat, serta memastikan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.

DISDUKCAPIL Minahasa terus berupaya meningkatkan sistem penggajian dengan pembaruan aplikasi SIPD dan koordinasi dengan BPKAD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa bertanggung jawab atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sistem penggajian merupakan komponen yang sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan ini lancar. Menurut temuan yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Permasalahan yang biasa terjadi pada sistem penggajian ialah keterlambatan pembayaran gaji pegawai dikarenakan terlambat pemasukan dokumen atau data seperti daftar gaji pegawai dan daftar hadir pegawai. Akibat dari keterlambatan pembayaran gaji pegawai dapat menimbulkan kurangnya motivasi pada kinerja pegawai. Untuk itu, suatu instansi atau perusahaan memerlukan sistem penggajian yang baik dan layak agar terhindar dari kesalahan. Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh sistem penggajian yang baik.

KAJIAN TEORI

Akuntansi

Kambey (2021) mengatakan akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan, dan laporan yang disusun untuk memberikan data keuangan yang dibutuhkan manajemen perusahaan untuk tujuannya. Akuntansi Mustika (2022) adalah istilah yang mengacu pada teknik pencatatan, pengkategorian, dan peringkasan transaksi dan peristiwa keuangan. dalam Reivaldo Roel, & Frida Magda Sumual, Aprilil Bacilus (2023).

Bawimbang (2021) dalam Linda A.O.Tanor, Aprilil Bacilius, dan Cindy Claudia Bataha (2023) mengatakan bahwa informasi akuntansi adalah informasi penting yang harus diketahui pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapat informasi tentang proses laporan keuangan dalam sistem informasi. Informasi akuntansi juga dikenal sebagai informasi akuntansi yang efisiensi, yang menunjukkan apakah suatu perusahaan telah menjalankan laporan keuangan dengan benar atau tidak.

Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Rifai et al. (2016) dalam Jhony Manaroinsong & Tesalonika P.V Tombuku (2022), SAP adalah standar akuntansi pemerintah yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan. Karena itu, SAP memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian

Sistem penggajian, menurut Aferiaman (2019), adalah sistem akuntansi penggajian yang dimaksudkan untuk menangani pembayaran dan transaksi penggajian pegawai sesuai anggaran. Ada tiga sistem penggajian yang berbeda. Sistem skala tunggal adalah yang pertama, yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai dengan pangkat yang sama tanpa mempertimbangkan seberapa berat tugas mereka; sistem skala ganda adalah yang kedua, yang menentukan gaji berdasarkan tugas dan tanggung jawab pegawai; dan sistem skala gabungan adalah yang ketiga, yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai dengan pangkat yang sama tanpa mempertimbangkan seberapa berat tugas mereka.

Informasi Yang Diperlukan Manajemen Dalam Sistem Akuntansi Penggajian

Informasi yang diperlukan untuk pengelolaan penggajian adalah: 1) jumlah biaya gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan selama periode akuntansi tertentu; 2) jumlah biaya yang ditanggung oleh setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu; 3) jumlah uang yang diterima oleh masing-masing karyawan selama periode akuntansi tertentu; 4) rincian komponen biaya gaji yang ditanggung oleh perusahaan dan masing-masing pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu Menurut Mulyadi (2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa di Sasaran, Tondano Utara, Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Lokasi ini dipilih karena terkait dengan penelitian peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, dihitung dari dikeluarkan surat izin survey, 30 juni 2024. Data yang dikumpulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa digunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini dilakukan melalui proses observasi dengan melihat langsung fenomena industri, wawancara kepada kepala dinas, subdivisi umum dan kepegawaian sebagai informan dalam penelitian ini, dokumentasi yang berupa laporan keuangan, daftar gaji, kartu jam kerja dan kartu jam hadir. Tujuannya untuk menjelaskan kualitas atau keunggulan dampak sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau dijelaskan melalui pendekatan kualitatif. suatu kejadian dan mengaitkannya dengan teori tertentu yang dimulai dengan observasi, perolehan data, analisis informasi, dan pelaporan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Akuntansi Penggajian PNS Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, dan peneliti sudah menentukan informan yang akan membantu peneliti untuk melengkapi data yang akan dipakai sebagai hasil penelitian.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa, sistem akuntansi penggajian PNS dengan sistem akuntansi akuntansi penggajian PNS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi penggajian di

DISDUKCAPIL Minahasa melalui fungsi yang terkait sudah sesuai dengan standar yang diterapkan yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pembuatan daftar gaji, fungsi akuntansi, fungsi keuangan, catatan akuntansi, dokumen yang digunakan, dan prosedur yang membentuk sistem maka dapat diketahui bahwa sistem akuntansi penggajian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sudah sesuai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian penulis tentang Sistem Akuntansi Penggajian PNS Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa sistem tersebut sesuai untuk melakukan berbagai tugas penting seperti akuntansi, keuangan, kepegawaian, pencatatan waktu, dan pembuatan daftar gaji. Semua operasi tersebut dijalankan sesuai dengan PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menggunakan teknologi yang mendukung efisiensi dan akurasi pencatatan.

Namun, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem, disarankan agar Dinas mengadopsi teknologi digital, melakukan pelatihan rutin, dan menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, sistem akuntansi penggajian diharapkan dapat berfungsi lebih baik dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan teknologi. Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap disiplin pegawai dalam melaksanakan absensi, setiap pegawai wajib mengisi daftar hadir secara tepat waktu untuk memastikan akurasi data kehadiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aferiaman, T. (2019). *Jam Pembnas. Akuntansi Dan Manajemen Pembnas*, 5(1), 76–82
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bawimbang, P. M., Rorong, I. P., & Siwu, H. F. (2021). *Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado*.
- Indriani, S. 2023. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Mi Baiturrahman Teluk Kuantan." *Juhanperak*, 1048–61.
- Kambey J., Senduk V. A., & Manansal, R A. 2021. "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Pada Pt.Bosowa Berlian Motor (Cabang Manado)." *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 2(3): 345–55. Doi:10.53682/Jaim.Vi.2223.
- Kawatu, Freddy Samuel. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Deepublish.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Ponto, Monica T., And Stanly W. Alexander. 2018. "Ipteks Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat* 2 (02): 626–31. <https://doi.org/10.32400/Jiam.2.02.2018.21847>.
- Yadiati, W. (2007). *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Yandri, Delfy, And Ayu Fitri Rosianie, 'Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengendalian Internal Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat', *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2.2 (2021), 86–92
- Yoyo Sudaryo, Et. All. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Yusuf, Rosdiana, And Hendra Setiawan. 2022. "Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor." *Jurnal Informatika Kesatuan* 2 (1): 63–70. <https://doi.org/10.37641/Jikes.V2i1.1376>.
- Reivaldo Roel, Frida Magda Sumual, And Aprilil Bacilus. 2023. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang." *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist* 6(2): 146–59. <https://doi.org/10.46880/Jsika.Vol6no2.Pp146-159>.

- Tanor, Linda Anita Octavia, Aprili Bacilius, And Cindy Claudia Bataha. 2023. "Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik." Jurnal Akuntansi Manado (Jaim) 4 (3): 620–29. <https://doi.org/10.53682/Jaim.Vi.4206>.
- Tombuku, Tesalonika, And Johny Manaroinson. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Minahasa." Jurnal Akuntansi Manado (Jaim) 3 (2): 149–56. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V3i2.2185>